

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II : MANAJEMEN ASET , OPERASIONAL RSUD, PENDAPATAN ASLI DAERAH , PERIJINAN

Semarang, **Jumat (27 Nopember 2015)** – Hari ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan acara **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II : MANAJEMEN ASET, OPERASIONAL RSUD, 'PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERIJINAN**. LHP yang diserahkan terdiri Sembilan buah dengan rincian sebagai berikut: Manajemen Aset sebanyak empat kabupaten (Kabupaten Pati, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Brebes), Operasional sebanyak dua RSUD (RSUD Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen dan RSUD Dr. R. Soeprpto Cepu Kabupaten Blora), PAD sebanyak dua kabupaten/kota (Kabupaten Banjarnegara dan Kota Pekalongan) dan Perijinan Kota Magelang.

Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.I.A., C.F.E, memberikan sambutan antara lain terkait jenis dan metodologi pemeriksaan atas empat obyek yang diperiksa (Manajemen Aset, Operasional RSUD, PAD dan Perijinan) dan dikahiri dengan pengungkapan temuan dan rekomendasinya.

Hal-hal yang masih menjadi sorotan dalam Manajemen Aset adalah terkait Pencatatan aset tetap dan aset lainnya tidak/kurang memadai, Penghapusan barang milik daerah belum memadai, Pengamanan barang milik daerah kurang memadai, Pemanfaatan aset.

Ada pun hal-hal yang masih perlu dilakukan perbaikan dalam operasional RSUD adalah Pengelolaan RSUD belum sesuai sepenuhnya sesuai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Pengembangan SIM RS belum dilaksanakan secara memadai, Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan Pendapatan Belum Sepenuhnya Memadai, Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai Peraturan Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk pemeriksaan PAD, diketahui hal sebagai berikut Pendaftaran dan pendataan Pajak Hotel dan Restoran belum memadai dan Pemungutannya tidak sesuai ketentuan, Pemungutan BPHTB tidak sesuai ketentuan, dan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan tidak optimal dan tidak sesuai dasar pengenaan yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan, sehingga terdapat potensi pendapatan tidak diperoleh dan kurang diterima.

Dan terkait pemeriksaan perijinan yang telah dilakukan, ditemukan hal-hal sebagai berikut SOP Perizinan Belum Sesuai Ketentuan, Pelayanan Perijinan IMB Tidak Sesuai Ketentuan, Pemantauan Kepemilikan Izin Gangguan Belum Optimal, dan Pengendalian Terhadap Masa Berlaku Izin Trayek Dan Kartu Pengawasan Belum Memadai.